

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Amir Ilyas, dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021)
- Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- R. Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- R. Subekti, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Intermasa, 1999)
- R. Subekti, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002)
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1996)
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Wirdjono Prodjodikoro, *Azas - Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000)

Jurnal:

- Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri, "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Institusi Polgan*, Vol. 5, No.1 Februari 2022. 181-182. DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11323
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No.2 (2023):191. DOI: <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/865>

- Darwis L. Rampay, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Jurnal Morality*, Vol. 2, (2015): 3-4. ISSN 2614-2228.
- Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Recital Review*, Vol. 2, (2020): 95-98. ISSN 2623-2928.
- Siti Yuli Yanna "Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.8 (2023): 2313. DOI:<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.451>
- Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Pembuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No.1 Maret 2021: 931. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Yoliandri Nur Sharky , dan Gunawan Djajaputra, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan", *UNES LAW REVIEW*, Universitas Tarumanagara, Vol. 6, No. 4 Juni 2024. 9829. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1933>

Hasil Penelitian:

- Nur Syarifah, S.H., LLM dan Reghi Perdana, S.H., LLM., "Hukum Perjanjian", Universitas Terbuka, modul.1, (2015)
- Annisa, "Pengertian Perjanjian Pra Nikah, Isi dan Tujuan", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)
- Reglement op de Gemengde Huwelijken* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1898 Nomor 158)

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 52)

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Putusan Nomor:1184/ Pdt.G/2020/PN Dps
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970

Website/ Internet:

Badan Pusat Statistik, “ Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023”.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> , diakses 11 Desember 2024.

CNN Indonesia, “Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir”<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>, diakses pada 4 Juli 2024.

Kandara Law, “Perjanjian Pasca Nikah: Tujuan dan Dasar Hukumnya”.
<https://kandaralaw.com/perjanjian-pasca-nikah/>, diakses pada 6 agustus.

Aloysius Law Office, “ Apa sih perbedaan Legalisir, Legalisasi dan Waarmerking?”.
<https://www.aloysius-lawoffice.com/knowledge-News1>, diakses pada 18 Agustus 2024.

SIP Law Firm, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi”.
<https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, diakses pada 24 agustus 2024.

SIP Law Firm, “Syarat Sahnya Penjanjian Berdasarkan Undang-Undang”.
<https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id> , diakses pada 20 agustus 2024.

Kamus/ Encyclopedia:

KBBI Daring, Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik, (Indonesia: Pusat Bahasa, 2008). <https://kbbi.web.id/wanprestasi>